

**PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DI PANTI SOSIAL
(Studi di Dinas Sosial Jawa Timur UPT Panti Sosial Remaja Terlantar
di Jombang)**

Rindam Raditya Riswanda, Mochamad Makmur, Romula Adiono
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: rindam_r@yahoo.com

Abstract: Implementation of the Program of Education and Training in Social Institutions (Studies in Social Service Unit East Java Jombang Abandoned Youth Social Services). AS Technical Implementation Unit In charge of Implementation Direct Service Program For people with social problems dropout displaced, displaced UPT Social Service Youth Program Jombang has been carrying out its activities in accordance with the position, duties and functions. The activity has been carried out as planned can, despite the findings of The TIN still far from expectations. However with determination, commitment and effort Repairs That has been done so far is expected in the future Coming Label will provide results The Maximum accordance BY Vision and Mission UPT Social Services Youth displaced Jombang. Similarly Profile UPT Social Service Youth displaced Jombang husband arranged to provide program information and dissemination And Existence Of UPT As Central Care, rehabilitation and social development dropout displaced in East Java. Finally, do not forget we are expecting criticism, Advice And Tips From ALL parties for improving hearts and Preparation Program Implementation Unit Profile psrt Jombang in the Future.

***Keywords :** Teens, Education, and Training*

Abstrak: Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan di Panti Sosial (Studi di Dinas Sosial Remaja Terlantar di Jombang). Sebagai unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan program pelayanan bagi penyandang masalah sosial remaja putus sekolah terlantar, UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang telah melaksanakan program kegiatannya sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya. Kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, meskipun hasil yang diperoleh masih jauh dari harapan. Namun dengan tekad, komitmen dan upaya perbaikan yang telah dilakukan selama ini diharapkan di masa datang akan memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan visi dan misi UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang. Demikian Profil UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang ini disusun guna memberikan informasi dan sosialisasi terhadap program dan eksistensi UPT sebagai pusat pelayanan, rehabilitasi dan pengembangan sosial remaja putus sekolah terlantar di Jawa Timur. Akhir kata, tak lupa kami mengharapkan kritik, saran dan petunjuk dari semua pihak guna penyempurnaan dalam pelaksanaan program dan penyusunan Profil UPT PSRT Jombang di masa mendatang.

Kata kunci: Remaja, Pendidikan, dan Pelatihan

Pendahuluan

Perubahan global dalam semua bidang kehidupan, membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat termasuk munculnya berbagai gejala, meningkatnya jumlah pengangguran dan meningkatnya angka kemiskinan, yang pada akhirnya juga berpengaruh meningkatnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Program prioritas penanganan masalah kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur adalah

penanganan Anak Terlantar termasuk di dalamnya Remaja putus sekolah terlantar. Jumlah anak terlantar di Jawa Timur cukup besar. Data anak terlantar yang terhimpun sampai dengan tahun terakhir adalah \pm 400.000 jiwa yang tersebar di 38 Kabupaten / Kota.

Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya yaitu melalui pelayanan sosial dalam panti. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang secara khusus memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan anak terlantar di Jawa Timur melalui pembinaan

dan bimbingan fisik, mental, perilaku sosial dan latihan ketrampilan kerja, bertujuan agar mereka dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya baik rohani, jasmani maupun sosial. UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang berusaha untuk menumbuhkan dan meningkatkan ketrampilan sosial dan ketrampilan kerja klien sebagai sasaran garapan, yang selanjutnya dapat dijadikan bekal kelangsungan hidupnya secara wajar di masa datang.

Visi dari UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang yaitu "*Terwujudnya Remaja berperilaku normatif, terampil, dan mandiri.*" Guna mencapai visi tersebut, misi telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar, serta rehabilitasi dan atau bimbingan mental, perilaku sosial dan dan fisik.
2. Melaksanakan pengembangan dan atau latihan ketrampilan kerja sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar.
3. Melaksanakan penyaluran dan atau pengembalian kepada keluarga atau masyarakat, serta pembinaan lanjut.

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan yang dilaksanakan UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang dalam memberdayakan remaja putus sekolah terlantar, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan , kepercayaan diri dan harga diri remaja putus sekolah terlantar yang mampu berperilaku adaptif dan normatif.
2. Mengembangkan potensi, minat dan bakat remaja putus sekolah terlantar menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna.
3. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial serta ketrampilan kerja remaja putus sekolah terlantar menjadi SDM yang produktif dan mandiri.

UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan program kerja UPT
2. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan ketatausahaan, penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial, rehabilitasi dan Binjut
3. Penyelenggaraan praktek pekerjaan sosial dalam rehabilitasi sosial
4. Pemberian bimbingan umum kepada klien di lingkungan UPT
5. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi / lembaga lain / perorangan dalam rangka pengembangan program UPT
6. Pengembangan metodologi pelayanan

kesejahteraan sosial dalam pengembangan kapabilitas remaja terlantar

7. Penyelenggaraan penyebarluasan informasi tentang pelayanan kesejahteraan sosial
8. Penyelenggaraan konsultasi bagi keluarga atau masyarakat yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial
9. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan
10. Pelaksanaan pelayanan masyarakat
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Tinjauan Pustaka

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia mencakup semua usaha yang dilaksanakan untuk pengembangan perilaku dan segenap kemampuan atau potensi yang dimiliki manusia sehingga menjadi manusia yang handal dan memiliki kematangan hidup yang dapat dipertanggung jawabkan serta mempersiapkan seseorang menjadi manusia seutuhnya yang mampu berpikir logis dan rasional serta mampu melaksanakan fungsinya sebagai makhluk Tuhan, insan sosial, warga Negara dan anggota masyarakat. Hal serupa juga diungkapkan oleh Notoatmodjo (1992:12) bahwa pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek: yaitu kuantitas dan kualitas, pengertian kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia, kuantitas tanpa disertai kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Manusia yang tidak berpendidikan sama halnya dengan membiarkan dirinya dikalahkan oleh orang lain dalam persaingan global seperti saat ini. Pendidikan tidak dapat dikesampingkan, karena pendidikan tidak pernah habis. Pendidikan akan selalu bertambah dan menjadi luas sesuai dengan perkembangan zaman. Seseorang dapat dikatakan berpendidikan apabila dia memiliki bekal keilmuan dan dapat menerapkannya dalam kehidupannya.

Program dan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan di UPT PSRT Jombang, meliputi 6 (enam) tahap :

- a. Pendekatan Awal yang berupa Orientasi dan konsultasi, Identifikasi, Motivasi,

- Seleksi
- b. *Assesment* yang berupa Registrasi, Pengungkapan dan pemahaman masalah, Penempatan dalam program pelayanan, Bimbingan orientasi
 - c. Pelayanan, Rehabilitasi dan Pengembangan Sosial yang berupa Pelayanan Papan (Pengasramaan), Pelayanan pangan (Permakanaan), Pelayanan sandang dan d. Pelayanan Kesehatan yang berupa bimbingan mental, bimbingan sosial dan bimbingan fisik.

3. Pembinaan

Dari pengertian pembinaan yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia di atas dapat diketahui bahwa pembinaan berkaitan dengan suatu perbuatan berupa tindakan dan kegiatan dalam rangka pembaharuan, penyempurnaan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang baik.

Kesinambungan program kerja UPT sangat erat kaitannya dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT. Sarana dan prasarana yang terdapat di UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang antara lain:

- Tanah
- Bangunan
- Peralatan dan perlengkapan

a. Tanah

Luas areal tanah UPT PSRT Jombang secara keseluruhan adalah 38.650 M2 terletak di dua desa di pinggiran kota Jombang yaitu Desa Sengon dan Kepatihan. Letak Desa Sengon berhadapan dengan Desa Kepatihan dan hanya dipisahkan oleh jalur jalan protokol. Penggunaan tanah yang ada tersebut antara lain untuk mendirikan dan selebihnya untuk sarana olah raga, lahan parkir, lahan pertanian dan pekarangan.

Status kepemilikan tanah, UPT PSRT Jombang telah memenuhi kriteria persyaratan berdirinya UPT, karena menurut standar minimal luas tanah untuk Panti adalah 2 Ha. (Juknislak PPA, Binkesos, KAKLU, 1986).

b. Bangunan

UPT PSRT Jombang sebagai sarana dan prasarana pembinaan kegiatan sosial, dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial memerlukan fasilitas bangunan. Berbagai jenis bangunan yang dimiliki panti saat ini meliputi gedung kantor, rumah dinas pejabat struktural, ruang bimbingan, ruang ketrampilan (6 kelas), dapur dan ruang makan, masjid, gedung indoor (Gedung "Griya Taruna"), wisma tamu, pos Satpam, fasilitas olah raga (lapangan basket, tenis, dan bola volley,), asrama/cottage, serta fasilitas penunjang lainnya.

Sarana asrama / cottage yang tersedia sebanyak 9 buah dengan daya tampung rata-rata 15 orang / per-asrama, dengan satu keluarga asuh dalam satu asrama sebagai orang tua pengganti. Luas masing-masing asrama 1.800 M2, terdiri dari ruang tamu, ruang belajar, kamar tidur, dan MCK.

c. Peralatan dan perlengkapan

Peralatan dan perlengkapan Panti yang merupakan barang-barang inventaris milik PSRT Jombang antara lain meliputi :

- Peralatan kantor,
- Peralatan rumah tangga panti,
- Peralatan ketrampilan,
- Perlengkapan transportasi dan komunikasi.

Peralatan dan perlengkapan tersebut sangat membantu dan mendukung kelancaran kerja. Berbagai peralatan dan perlengkapan yang ada saat ini jumlahnya sudah cukup memadai, baik untuk keperluan kantor, rumah tangga panti, kegiatan ketrampilan maupun transportasi dan komunikasi yang kesemuanya telah terangkum dalam daftar inventaris.

4. Hambatan

a. Dari Klien

Latar belakang pendidikan klien yang heterogen sehingga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dan kemampuan klien dalam proses belajar mengajar baik secara teori maupun praktek.

b. Dari Sumber Dana

Minimnya dana / anggaran yang tersedia (hanya berasal dari DPA) untuk alokasi program pelayanan sehingga berpengaruh terhadap kurangnya penyediaan bahan latihan ketrampilan maupun bentuk pelayanan fisik lainnya.

c. Dari Sumber Daya Manusia

Terbatasnya tenaga Instruktur dengan *skill* yang memadai, serta belum tersedianya tenaga-tenaga profesional di bidangnya sehingga proses bimbingan dan pembinaan masih kurang menunjukkan hasil yang optimal.

d. Dari Sarana dan Prasarana :

Kurangnya dukungan dana dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Panti sehingga bentuk pelayanan yang diberikan kepada klien kurang maksimal, seperti adanya kerusakan tempat tidur klien, alat-alat kebersihan dan prasarana bimbingan lainnya.

e. Dari Pelayanan :

Adanya informasi yang kurang seimbang antara petugas dari Instansi terkait di daerah (Dinas Sosial Kabupaten/Kota) dengan pihak UPT PSRT. Dalam hal ini, Instansi terkait di

daerah seringkali memberikan informasi dan harapan yang berlebihan kepada calon klien, padahal tidak sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang terdapat di UPT PSRT sehingga berpengaruh dalam proses bimbingan dan pembinaan kepada klien.

Pembahasan

1. Permasalahan dalam UPT PSRT di Jombang

Pelaksanaan proses pelayanan kesejahteraan sosial di UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang juga ditemukan adanya beberapa faktor penghambat, antara lain Minimnya bakat/minat dan kurangnya motivasi diri pada sebagian klien sehingga sangat berpengaruh terhadap proses pemecahan masalah yang dihadapi klien serta keberhasilannya mereka dalam mengikuti proses pelayanan, rehabilitasi dan pengembangan sosial di UPT. Hal ini sebagai akibat dari kesalahan pada sub sistem seleksi baik oleh pihak UPT maupun instansi pengirim di daerah yang lebih mengutamakan pada pemenuhan target kuantitas, Minimnya kualifikasi pada sebagian jenis ketrampilan yang ada sehingga berpengaruh terhadap hasil akhir (outcome) yang diharapkan, khususnya dalam menciptakan remaja terampil dan mandiri. Hal ini sebagai akibat dari masih lemahnya SDM panti khususnya tenaga instruktur ketrampilan, terbatasnya peralatan ketrampilan yang sebagian besar sudah dalam kondisi kurang layak pakai serta minimnya anggaran untuk pengadaan bahan ketrampilan.

Fenomena ini berdampak langsung terhadap proses bimbingan yang belum maksimal dan belum memenuhi standart pelayanan, yang pada akhirnya belum mampu menjangkau pada penciptaan klien yang memiliki kualitas dan skill yang dapat memenuhi tuntutan pasar. Solusinya adalah perbaikan pada sub sistem seleksi melalui peningkatan koordinasi antara pihak UPT dengan instansi pengirim yang ada di daerah, baik melalui penyebaran informasi tentang program UPT, persyaratan calon klien, maupun jenis ketrampilan yang tersedia. Upaya perbaikan ini juga dilakukan melalui kegiatan seleksi secara langsung ke daerah oleh petugas UPT (Pekerja Sosial Fungsional) dalam rangka mengetahui kondisi/kebutuhan calon klien serta bakat/minat yang dimiliki sehingga yang bersangkutan layak untuk diterima sebagai penerima pelayanan.

Menurut M. Arifin (1999, h.34) memberikan pemikiran tentang pengertian pendidikan, yaitu: "Pendidikan adalah proses dengan mana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat

diperoleh melalui pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik dibuat dan dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu kebiasaan yang baik".

Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan daerah dapat dikatakan sangat sentralistis. Walaupun UU Nomor 5 tahun 1974 mengatur pula tentang desentralisasi, namun kewenangan pemerintah Pusat terhadap Daerah masih lebih menonjol melalui implementasi asas dekonsentrasi. Disamping itu, kewenangan pemerintahan pada hakekatnya menjadi milik atau domain dari pemerintah Pusat, dan sebagian "diserahkan" kepada Daerah. Inilah sebabnya, segala pengaturan yang berkenaan dengan kewenangan, diatur sepenuhnya oleh pemerintah Pusat, termasuk dalam hal terjadi konflik dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, sangatlah logis jika pada masa lalu, seolah-olah tidak terjadi sengketa antar unit pemerintahan. Pemerintah daerah juga akan melakukan hal yang sama.

Untuk saat ini, sebagai dampak dari besarnya arus transformasi kewenangan dari Pusat ke Daerah, pemerintah tidak dapat begitu saja memerankan diri sebagai mediator. Bahkan sekalipun hendak menyediakan aturan dasar bagi penyelesaian konflik, hal ini hanya bisa dilakukan dalam tataran makro, yakni menetapkan standar-standar umum yang harus dipenuhi, sementara penyelesaian konflik secara detail tetap tergantung kepada kehendak dan kebebasan dari pihak yang berselisih.

Seiring dengan hal tersebut, maka penyelesaian sengketa yang timbul-pun tidak perlu lagi mengandalkan keikutsertaan institusi negara seperti pemerintah Pusat, pengadilan, atau lembaga publik lainnya. Hal ini perlu diperjelas adalah apakah arbitrase ini memang bisa diterapkan (*arbitrability*) untuk kasus di sektor publik. Pengembangan sumber daya manusia mencakup semua usaha yang dilaksanakan untuk pengembangan perilaku dan segenap kemampuan atau potensi yang dimiliki manusia sehingga menjadi manusia yang handal dan memiliki kematangan hidup yang dapat dipertanggung jawabkan serta mempersiapkan seseorang menjadi manusia seutuhnya yang mampu berpikir logis dan rasional serta mampu melaksanakan fungsinya sebagai makhluk Tuhan, insan sosial, warga Negara dan anggota masyarakat.

Pendekatan mutu modal manusia menekankan bahwa manusia adalah faktor produksi yang amat penting selain tanah, teknologi dan modal. Oleh karena itu bila

produktivitas akan ditingkatkan maka selain modal dan menambah *input* meningkatkan sumber daya alam. Menurut Effendi (1993:6) kualitas sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan dan secara teoritik diyakini bahwa tersedianya sejumlah sumber daya manusia yang tidak berkualitas tidak akan dapat menghasilkan keluaran (*output*) yang optimum.

Selain itu Notoamodjo mengemukakan bahwa batasan pengembangan sumber daya manusia bisa dilihat secara makro dan secara mikro. Secara makro pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia. Dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa sedangkan secara mikro merupakan suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai hasil optimal.

Pada tahap ini, kondisi eks klien telah berada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Melalui tahapan ini diharapkan eks klien telah mandiri dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembinaan lanjut dilakukan untuk memperkuat stabilitas perubahan dan peranan eks klien baik dalam melaksanakan fungsi sosialnya maupun dalam hal memanfaatkan ketrampilan dan pengembangan usaha yang ditekuni di daerahnya masing-masing. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk bimbingan dan motivasi kepada eks klien, serta evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan eks klien melalui kunjungan rumah (*home visit*) ke daerah, dengan waktu pelaksanaan antara 3 s/d 4 bulan setelah keluar dari UPT PSRT.

Untuk setiap tahun anggaran, UPT PSRT Jombang melaksanakan kegiatan pembinaan lanjut sebanyak 2 kali, yaitu setiap akhir semester. Sementara itu dalam kegiatan tidak langsung, pihak UPT telah membekali blanko laporan diri kepada setiap klien yang diharapkan mereka dapat melaporkan.

Pemberian stimulasi merupakan pemberian dukungan usi bagi klien untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak setelah yang bersangkutan keluar dari UPT PSRT. Pemberian stimulasi ini dilatarbelakangi dengan fenomena sosial yang ada, dimana jumlah angkatan dan pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia .

Pemberian bantuan stimulasi yang sesuai dengan jenis ketrampilan yang dimiliki, diharapkan klien mampu memanfaatkan sebagai modal kerja dan mengembangkan usaha atau menciptakan lapangan kerja mandiri. Dalam pemberian stimulasi ini diawali dengan penandatanganan

Berita Acara Penerimaan Barang (paket stimulasi) dan Surat Perjanjian dari masing-masing klien dengan Pekerja sosial fungsional. Surat perjanjian tersebut dibuat agar klien termotivasi untuk memanfaatkan dan mengembangkan bantuan dimaksud di lingkungan sosialnya masing-masing.

Kesimpulan

Peningkatan kualitas dalam proses pelayanan terhadap klien, hendaknya para pembina panti didorong untuk meningkatkan mutu, pengetahuan dan wawasan baik melalui sekolah, seminar, lokakarya maupun latihan-latihan ketrampilan teknis, serta peningkatan disiplin waktu dan disiplin kerja bagi setiap karyawan panti.

Meningkatkan fungsi panti sebagai pusat informasi, hendaknya penyebarluasan informasi tentang pelayanan panti lebih diefektifkan melalui peran aktif Pekerja Sosial Fungsional Panti dalam berbagai kegiatan seperti penyuluhan kepada masyarakat dan pengusaha, seminar dan lokakarya, *home visit* ke daerah (*tempat tinggal eks klien*), dan lain-lain.

Kendala yang dihadapi klien di masa datang, hendaknya peranan instansi pengirim yang ada di daerah mampu merekrut calon klien yang memiliki bakat/minat sesuai dengan jenis ketrampilan yang tersedia di panti . Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap eks klien hendaknya pengiriman calon klien dalam satu angkatan daerah asalnya dibatasi 10 – 12 kabupaten/kota yang mencakup wilayah garapan UPT Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Jombang., sehingga masing-masing kabupaten/kota mempunyai kuota pengimanan calon klien rata-rata 10 orang.

Dalam pelatihan diperlukan metode yang paling sesuai untuk menyampaikan materi kepada para peserta pelatihan oleh tim pelatih yang bersangkutan, penggunaan metode yang cocok akan mempermudah peserta latihan menerima materi yang diberikan, dengan demikian perubahan yang diharapkan dapat dicapai sesuai dengan tujuan pelatihan dan harapan peserta latihan keterampilan. Untuk dapat melaksanakan pelatihan, tidak dapat ditunjuk secara tegas mana yang paling baik. Hal ini karena masing-masing cara memiliki kelemahan dan kelebihan.

Peningkatan kualitas dalam proses pelayanan terhadap klien, hendaknya para pembina panti didorong untuk meningkatkan mutu, pengetahuan dan wawasan baik melalui sekolah, seminar, lokakarya maupun latihan-latihan ketrampilan teknis, serta peningkatan

disiplin waktu dan disiplin kerja bagi setiap karyawan panti.

Meningkatkan fungsi panti sebagai pusat informasi, hendaknya penyebarluasan informasi tentang pelayanan panti lebih diefektifkan

melalui peran aktif Pekerja Sosial Fungsional Panti dalam berbagai kegiatan seperti penyuluhan kepada masyarakat dan pengusaha, seminar dan lokakarya, home visit ke daerah (tempat tinggal eks klien), dan lain-lain.

Daftar Pustaka

- Anwar Prabu Mangkunegara. (2005) **Manajemen sumber daya manusia perusahaan**. Bandung.
- Effendi, Noer Tadjuddin. (1993) **Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan**. Jogjakarta, Tiara Wacana.
- Gomes, Faustine C. (2003) **Manajemen Sumber Daya Manusia**. Yogyakarta, CV. Andi Offset.
- Hasibuan M. (1994) **Manajemen Sumber Daya Manusia; Dasar dan Kunci Keberhasilan**. Jakarta, CV. Haji Masagung.
- Hidayat, S. (1985) **Pembinaan Generasi Muda**. Surabaya, Studi Group.